

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ombudsman RI D.I. Yogyakarta berperan penting dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, termasuk dalam kasus pengadaan barang *box* pedestrian oleh PT. Jasamarga Jogja-Bawen. Ombudsman RI D.I. Yogyakarta membantu mendorong pihak penyelenggara untuk lebih mempercepat proses penyelesaian perubahan ukuran *box* pedestrian sehingga dalam hal ini berhasil menyelesaikan laporan terkait pengadaan barang *box* pedestrian dalam proyek jalan tol Jogja-Bawen.

B. Saran

1. Ombudsman Republik Indonesia sebaiknya melakukan pembagian tugas terkait kewilayahan antara Ombudsman RI Perwakilan D.I. Yogyakarta dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.
2. PT. Jasamarga Jogja-Bawen sebaiknya sebelum melakukan perencanaan pembangunan fasilitas umum seperti *box* pedestrian di area pemukiman warga melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa maupun pemerintah setempat agar tidak terjadi miskomunikasi dan hal yang dapat merugikan kepentingan masyarakat desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto, 2014, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Antonius Sujata dan RM Surachman, 2011, *Catatan Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia*, Indonesia Development for Consultancy & Cooperation, Jakarta.
- Arya Wiguna, dkk. 2021, *Ombudsman dan Praktik Pelayanan Publik di Daerah*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan.
- Hadi Rahman, dkk. 2023, *Opini Pelayanan Publik*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan.
- Ombudsman Republik Indonesia, 2016, *Yang Bergiat Melawan Maladministrasi*, Jakarta Selatan.
- Ombudsman Republik Indonesia, 2014, *Untuk Para Pengabdian*, ed. Tim Komunikasi Publik, Jakarta.
- Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, *Berani Laporan!*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Yogi Suprayogi Sugandi, 2011, *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal

- Farah Fadila and Lince Magriasti, 2022, "Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi Bidang Pendidikan Di Kota Padang

Tahun 2020,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*
Volume 6.

Hauralya Salsabilla, 2024, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan,”
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial Voume 1 Nomor 3.

Nabila Firstia Izzati, 2020, “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Jurnal SASI Volume 26 Nomor 2.*

Nur Kholis, 2019, “Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court,”
Jurnal Ilmiah Hukum Volume 26.

Regina Angelita Br Sebayang, 2021, “Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia”,
Jurnal Pharmacognosy Volume 2.

Seri Mughni Sulubara, 2023, “Pengawasan Ombudsman Terhadap Kepentingan Publik Dalam Kaitannya Terhadap Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Volume 1.*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63. Jakarta.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Jakarta.

Internet

Adam Ilyas, 2020, “Menggali Perlindungan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara,” Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/341110297_Menggali_Perlindungan_Hukum_dalam_Hukum_Administrasi_Negara, diakses pada 29 Oktober 2024.

Mariani, 2021, “Kekuatan LAHP Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahpombudsman>, diakses 28 Oktober 2024.

Muhammad Adiguna Bimasakti, 2023, “Berkenalan Dengan Hukum Administrasi Negara,” Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/547-berkenalandengan-hukum-administrasi-negara.html>, diakses 29 Oktober 2024.

PTUN Yogyakarta, 2024, “Kegiatan Pengawasan Oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, <https://ptun-yogyakarta.go.id/kegiatanpengawasan-oleh-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-surabaya-di-pengadilan-tata-usaha-negarayogyakarta/> diakses pada 20 November 2024.

Tim Hukum Online, 2023, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,” Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum/lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 29 Oktober 2024.

Tim Hukum Online, 2007, ““BPKP Jangan Dibubarkan,”” Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bpkp-jangan-dibubarkan-ho116926/> diakses pada 20 November 2024.